



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT PRESIDEN
SUB UNIT KERJA : SEKRETARIAT PRESIDEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HERU BUDI HARTONO
2. Jabatan : KEPALA SEKRETARIAT PRESIDEN
3. NHK : 163218

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 13.357.181.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/145 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 564.176.000
2. Tanah Seluas 338 m2 di KOTA JAKARTA TIMUR , WARISAN Rp. 1.743.790.000
3. Tanah Seluas 3500 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 260.693.000
4. Tanah Seluas 461 m2 di KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.217.040.000
5. Tanah Seluas 162 m2 di KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 690.606.000
6. Bangunan Seluas 30 m2 di KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 307.788.000
7. Tanah Seluas 330 m2 di KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 2.573.186.000
8. Tanah Seluas 154 m2 di KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 656.502.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/267 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 3.843.400.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/96 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 572.300.000**

1. MOTOR, HONDA ND. 125 KIRA Tahun 2003, HIBAH DENGAN



AKTA Rp. 3.300.000		
2. MOBIL, SUZUKI ESCUDO Tahun 1996, HASIL SENDIRI	Rp.	47.000.000
3. MOBIL, TOYOTA HILUX Tahun 2015, HASIL SENDIRI	Rp.	222.000.000
4. MOBIL, JIMNY JIMNY Tahun 2019, HASIL SENDIRI	Rp.	300.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	484.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	7.802.255.063
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	22.215.736.063
III. HUTANG	Rp.	38.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	22.177.736.063

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **9 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.